

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. 2019. Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kepastian Pelayanan Publik Di Desa Melalui Standar Pelayanan. *Journal Of Public Administration And Local Governance*, 3(1), 37–51.
- Abdussamad, H. Z., dan SIK, M. S. 2021. *Metode penelitian kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Asmarianti, A., dan Ikram, M. N. 2023. Perancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pada Kantor Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar. *Admit: Jurnal Administrasi Terapan*, 1(1), 89–106.
- Bazarah, J. 2023. Implementasi Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Kajian Literasi Permasalahan Pelayanan Publik di Indonesia). *Prediksi: Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*, 22(1), 35–43.
- Chalik, Abdul., dan Habibullah, Muttaqin. 2015. *Pelayanan Publik Tingkat Desa*. Yogyakarta. Sagaf, The Sunan Giri Foundation.
- Hardiyansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Habibi, M. M., Sukriono, D., Rapita, D. D., dan Sudirman, S. (2019). Pendampingan Pembentukan Standar Pelayanan Publik Pemerintahan Desa Sebagai Upaya Mewujudkan Good Village Governance. *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 19–27.
- Kasmar., Gufran., Syamsuddin., dan Akbar, R. 2021. Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Di Desa Dorokobo Kabupaten Dompu Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima. *J-Abdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. 1(5), 2013–2015.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang pedoman Standar Pelayanan.
- Kementerian Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.
- Kementerian Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.

- Lanak, B. 2021. Peran Perangkat Desa dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Gajahrejo, Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 16–24.
- Mayasari, B., dan Budiantara, M. 2023. Penerapan Standar Pelayanan Publik di Desa Gesikan. Yogyakarta. *Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri*. 2(2).
- Ombudsman Republik Indonesia. 2021. *Ringkasan Eksekutif Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2021*.
- Ombudsman Republik Indonesia. 2022. *Ringkasan Eksekutif Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022*.
- Palangda, L., dan Dame, J. M. 2020. Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *Public Policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis)*, 1(2), 273–287.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Sugiman. 2018. Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95.
- Samad, Z., Mustanir, A., dan Pratama, M. Y. P. 2019. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Untuk Mewujudkan Good Governance Kabupaten Enrekang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(4), 379–395.